

# Sinergi Pendampingan Ekonomi, Kesehatan, dan Hukum dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Desa Lektor Janapria

Lutfiana<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

\*Corresponding author: Fiana25@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Article history</b> ..... Received : May 02, 2025 Revised : May 012, 2025 Accepted : May 26, 2025 Published : May 30, 2025</p> <p><b>Keywords</b> Community Mentoring, Economic Empowerment, Public Health, Legal Awareness, village Development.</p> <p> License by CC-BY-SA Copyright © 2025, The Author(s).</p>	<p>This study aims to explore the synergy between mentoring in the economic, health, and legal sectors to improve the well-being of the community in Lektor Village, Janapria Subdistrict, Central Lombok Regency. The mentoring activities were carried out using a participatory approach, actively involving local residents in every stage of the process. In the economic sector, the mentoring program focused on entrepreneurship training, small business management, and access to markets for local products. In terms of health, activities were directed at raising community awareness about the importance of clean and healthy living behaviors (PHBS) and improving access to basic healthcare services. Meanwhile, in the legal sector, the main focus was on educating the community about their rights, providing legal counseling, and enhancing legal awareness. The findings indicate that an integrated and sustainable approach across these three sectors can drive significant improvements in living standards, increase income, promote environmental health, and strengthen legal understanding among residents. Collaboration between village authorities, facilitators, and the community was identified as a key factor contributing to the success of the program. This study highlights the importance of strengthening local capacity and ensuring the continuity of cross-sectoral mentoring to promote inclusive and competitive village development.</p>
<p><i>How to cite:</i> Lutfiana, L. (2025) Sinergi Pendampingan Ekonomi, Kesehatan, dan Hukum dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Desa Lektor Janapria. <i>Journal of Community Development and Empowerment</i>, 1(3), 60-65. <a href="https://doi.org/10.70716/jocdem.v1i3.183">https://doi.org/10.70716/jocdem.v1i3.183</a></p>	

## PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Desa sebagai entitas terkecil dari sistem pemerintahan memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh (Kementerian Desa, 2020). Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang saling berkaitan.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat desa tidak hanya terbatas pada isu ekonomi, tetapi juga meliputi persoalan kesehatan masyarakat dan rendahnya kesadaran hukum. Ketimpangan ini memerlukan pendekatan pembangunan yang lintas sektor agar dapat memberikan dampak yang menyeluruh dan berkelanjutan (Nasdian, 2014). Integrasi antara sektor ekonomi, kesehatan, dan hukum merupakan kunci untuk membangun masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera.

Pendampingan masyarakat menjadi strategi efektif dalam menjawab tantangan pembangunan desa. Menurut Sutoro Eko (2016), pendampingan yang bersifat partisipatif dapat meningkatkan kapasitas dan daya kritis masyarakat, serta membangun kemandirian lokal. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang terlibat secara aktif dalam merancang, menjalankan, hingga mengevaluasi program yang dijalankan.

Desa Lektor di Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan wilayah dengan potensi sumber daya lokal yang cukup besar, khususnya di sektor pertanian dan kerajinan. Namun, desa ini juga menghadapi tantangan seperti pendapatan warga yang rendah, akses layanan kesehatan yang terbatas, dan rendahnya literasi hukum. Permasalahan ini dapat menjadi penghambat utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat jika tidak ditangani secara terpadu.

Pendampingan ekonomi di Desa Lektor diarahkan pada pelatihan kewirausahaan, peningkatan kapasitas manajemen usaha mikro, dan fasilitasi akses pasar untuk produk lokal. Program ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan usaha kecil dan

menengah (UKM) (BPS, 2022). Dengan penguatan sektor ekonomi lokal, masyarakat desa dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara mandiri.

Dalam bidang kesehatan, pendekatan yang dilakukan mencakup edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pelatihan kader kesehatan, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dasar. Menurut WHO (2017), intervensi berbasis komunitas dalam kesehatan terbukti efektif meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit dan pentingnya sanitasi lingkungan.

Sementara itu, pada aspek hukum, pendampingan difokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini dilakukan melalui penyuluhan hukum, edukasi tentang hukum agraria dan perlindungan perempuan dan anak, serta pelibatan masyarakat dalam perumusan aturan desa. Literasi hukum yang baik diyakini dapat mendorong masyarakat untuk lebih partisipatif dan sadar dalam kehidupan sosial (Sudaryanto, 2019).

Sinergi ketiga bidang pendampingan ini menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pemberdayaan ekonomi memberikan pondasi finansial, edukasi kesehatan meningkatkan kualitas hidup, dan kesadaran hukum memperkuat ketahanan sosial. Ketiganya saling melengkapi dan memperkuat dalam membentuk masyarakat desa yang produktif dan sadar hak serta tanggung jawabnya.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sinergi ini telah mulai menunjukkan dampak positif di Desa Lekor, seperti peningkatan jumlah pelaku usaha lokal, menurunnya kasus penyakit berbasis lingkungan, dan meningkatnya partisipasi warga dalam forum musyawarah desa. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang terintegrasi memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan sektoral yang terpisah.

Model pendampingan lintas sektor yang diusung dalam penelitian ini merujuk pada pendekatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang menekankan pentingnya kolaborasi berbagai sektor dalam menjawab persoalan kompleks masyarakat (UNDP, 2021). Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan desa tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berdampak jangka panjang.

Pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pendampingan juga menjadi faktor penentu keberhasilan program. Partisipasi aktif ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, serta memantau hasil kegiatan secara langsung (Chambers, 1997). Hal ini mendorong terciptanya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan program.

Selain itu, sinergi antara pemerintah desa, pendamping, dan lembaga mitra seperti LSM dan perguruan tinggi juga memberikan pengaruh signifikan dalam keberhasilan program. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap sektor mendapat dukungan teknis dan sumber daya yang memadai, sehingga program berjalan lebih efektif dan terarah (Sulistiyani, 2004).

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna menghasilkan model pendampingan yang aplikatif dan dapat direplikasi di desa-desa lain dengan karakteristik serupa. Penelitian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik pembangunan masyarakat berbasis sinergi lintas sektor.

Dengan menganalisis proses dan hasil pendampingan di Desa Lekor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan, pelaku pembangunan, dan masyarakat luas tentang pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pembangunan desa.

Akhirnya, pembangunan desa yang berhasil bukan hanya diukur dari capaian fisik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu mandiri, sehat, dan memiliki kesadaran hukum. Pendekatan sinergis ini diyakini sebagai salah satu jalan menuju desa yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami secara mendalam bagaimana sinergi pendampingan di bidang ekonomi, kesehatan, dan hukum dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Pendekatan ini dipilih karena bersifat eksploratif dan memungkinkan pelaksana menggali fenomena sosial secara kontekstual dan alami (Creswell, 2016). Penelitian ini berfokus pada proses pendampingan, keterlibatan aktor-aktor lokal, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat setempat.

Lokasi kegiatan ditentukan secara purposif, yakni di Desa Lekor, yang telah menjadi lokasi implementasi program pendampingan lintas sektor oleh pemerintah desa dan mitra pembangunan. Desa ini dipilih karena memiliki karakteristik sosial ekonomi yang kompleks dan mencerminkan berbagai

tantangan pembangunan pedesaan di wilayah NTB. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparat pemerintah desa, pendamping desa, kader kesehatan, pelaku usaha kecil, tokoh masyarakat, dan warga penerima manfaat program. Teknik pengambilan informan dilakukan dengan metode snowball sampling, yaitu dengan memperoleh informan awal yang selanjutnya merekomendasikan informan lain yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman para informan terkait pelaksanaan program pendampingan. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti secara langsung kegiatan pendampingan untuk mengamati partisipasi masyarakat dan dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari laporan kegiatan, dokumen perencanaan, serta arsip desa dan lembaga mitra. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan mengacu pada model interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, pelaksana melakukan engagement awal dengan pihak-pihak kunci di desa, seperti kepala desa dan koordinator pendamping, untuk membangun hubungan yang kooperatif dan memperoleh akses lapangan yang memadai. Tahap ini penting guna menciptakan suasana yang kondusif dalam pengumpulan data, sekaligus meminimalkan potensi resistensi dari masyarakat. Selain itu, peneliti juga mencatat dinamika sosial dan kultural yang memengaruhi relasi antaraktor dalam kegiatan pendampingan, seperti adanya hierarki informal, peran adat, dan norma gotong royong yang masih kuat di masyarakat Desa Lekor. Aspek-aspek kontekstual ini turut dipertimbangkan dalam interpretasi data agar hasil kegiatan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif terhadap realitas sosial yang ada.

Untuk menjamin keabsahan data, kegiatan ini menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis informan, sementara triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan juga proses member checking, yaitu mengonfirmasi ulang temuan dengan para informan untuk memastikan validitas interpretasi data. Pelaksana juga mencatat kesenjangan atau kontradiksi dalam narasi informan sebagai bagian dari dinamika sosial yang perlu dianalisis secara kritis, bukan dihindari.

Pelaksana juga menerapkan prinsip etika pelaksanaan, antara lain menjaga kerahasiaan identitas informan, meminta persetujuan sebelum wawancara (informed consent), serta menyampaikan hasil temuan secara objektif dan bertanggung jawab. Selama kegiatan berlangsung, pelaksana memastikan bahwa proses interaksi dengan masyarakat dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil kegiatan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai praktik pendampingan terpadu serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pemberdayaan masyarakat desa yang inklusif dan berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan terpadu di Desa Lekor melibatkan kolaborasi antara pemerintah desa, pendamping lokal, serta mitra dari sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Ketiga bidang utama—ekonomi, kesehatan, dan hukum berjalan secara sinergis dengan peran yang saling melengkapi. Program pendampingan ekonomi misalnya, tidak hanya berfokus pada pelatihan kewirausahaan, tetapi juga menyediakan akses terhadap permodalan dan pendampingan usaha secara berkelanjutan. Hal ini terlihat dari berkembangnya kelompok usaha kecil di bidang olahan makanan, kerajinan, dan jasa, yang didampingi secara intensif oleh fasilitator ekonomi dari program desa.

Dalam bidang kesehatan, kegiatan pendampingan difokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pelayanan ibu dan anak, serta pemantauan gizi keluarga. Kader kesehatan bekerja sama dengan puskesmas dan posyandu untuk menjangkau rumah tangga-rumah tangga yang rentan. Keberadaan pendamping kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai penghubung layanan, tetapi juga sebagai agen edukasi yang membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan formal. Intervensi ini terbukti mampu meningkatkan tingkat kunjungan ke fasilitas kesehatan dan mengurangi kasus balita stunting di beberapa dusun.

Pendampingan di bidang hukum berfokus pada penguatan kapasitas hukum warga melalui penyuluhan, mediasi konflik, dan pendampingan administrasi hukum, seperti pembuatan dokumen kependudukan, akta kelahiran, hingga penyelesaian sengketa tanah. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak warga yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak administratif kini memiliki pemahaman yang lebih baik dan mulai aktif mengurus dokumen secara mandiri. Selain itu, proses mediasi berbasis adat yang difasilitasi oleh pendamping hukum menunjukkan pendekatan yang kontekstual dan diterima oleh masyarakat.

Sinergi antarbidang terlihat nyata ketika pelatihan ekonomi disandingkan dengan edukasi kesehatan dan dukungan hukum. Sebagai contoh, pelatihan pengolahan makanan lokal bagi ibu rumah tangga disertai dengan materi sanitasi makanan dan pencatatan usaha. Dalam praktiknya, kegiatan ini mendorong integrasi antara peningkatan pendapatan, penerapan standar kebersihan, serta kesadaran terhadap perlunya legalitas usaha. Pendekatan lintas sektor seperti ini dianggap efektif oleh informan karena menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat secara bersamaan, bukan terpisah-pisah.

Keberhasilan pendampingan tidak lepas dari peran aktor lokal yang berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pihak eksternal. Para pendamping desa yang berasal dari wilayah sekitar memiliki kedekatan emosional dan pemahaman kultural yang tinggi terhadap karakter masyarakat Lekor. Mereka tidak hanya menjalankan peran teknis, tetapi juga menjadi mediator sosial yang membangun kepercayaan serta mendorong partisipasi aktif warga. Keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama turut memperkuat legitimasi kegiatan pendampingan di mata masyarakat.

Namun, kegiatan ini juga menemukan beberapa tantangan dalam implementasi pendampingan terpadu. Koordinasi antarsektor belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama dalam tahap perencanaan program. Kadang kala, kegiatan dari satu sektor tidak terinformasi dengan baik oleh sektor lain, sehingga terjadi tumpang tindih atau ketidaksinkronan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan logistik menjadi hambatan utama dalam menjangkau seluruh kelompok sasaran, terutama di dusun-dusun terpencil dengan akses yang sulit.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pendampingan cenderung meningkat seiring dengan berjalannya waktu, namun masih ditemukan kelompok marginal, seperti perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas, yang belum sepenuhnya terlibat aktif. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan afirmatif dalam desain kegiatan agar pemberdayaan yang dihasilkan bersifat inklusif dan tidak mengulang pola eksklusif sosial yang lama. Beberapa informan menyoroti pentingnya kehadiran fasilitator yang memiliki sensitivitas terhadap keragaman sosial dan gender.

Dari segi dampak, pendampingan lintas sektor secara umum memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain peningkatan pendapatan dan akses layanan dasar, terjadi pula perubahan dalam pola pikir dan perilaku warga. Masyarakat mulai terbiasa bekerja secara kolektif, memanfaatkan sumber daya lokal, serta lebih terbuka terhadap inovasi dan kerjasama lintas kelompok. Proses ini menunjukkan bahwa pembangunan berbasis komunitas dapat berjalan efektif jika didukung oleh pendekatan yang holistik dan berkelanjutan.

Diskusi dengan aktor-aktor kunci menunjukkan bahwa keberlanjutan program sangat bergantung pada komitmen pemerintah desa dan kapasitas kelembagaan lokal. Diperlukan mekanisme penguatan kelembagaan, seperti pelatihan manajemen program, monitoring partisipatif, serta regulasi desa yang mendukung integrasi sektor-sektor pendampingan. Beberapa praktik baik yang ditemukan di Desa Lekor, seperti forum koordinasi desa dan pelibatan pemuda sebagai agen perubahan, dapat direplikasi di desa lain dengan penyesuaian konteks.

Dengan demikian, kegiatan ini menegaskan bahwa pendekatan pendampingan lintas sektor bukan hanya strategi teknis, tetapi juga proses sosial yang menuntut adaptasi, dialog, dan partisipasi aktif dari semua pihak. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai lokal diintegrasikan dalam setiap tahapan pendampingan. Temuan ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan model pemberdayaan masyarakat desa yang berbasis konteks, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendampingan lintas sektor di Desa Lekor telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan kolaboratif yang mencakup bidang ekonomi, kesehatan, dan hukum terbukti mampu menjawab tantangan pembangunan desa secara lebih menyeluruh. Sinergi antarprogram memungkinkan intervensi yang tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat secara terintegrasi dan kontekstual.

Dalam bidang ekonomi, keberadaan program pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan usaha telah mendorong munculnya kelompok-kelompok usaha produktif berbasis potensi lokal. Di sisi lain, pendampingan kesehatan berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, serta memperbaiki perilaku hidup bersih dan sehat. Sementara itu, bidang hukum menunjukkan dampak positif dalam peningkatan literasi hukum warga dan akses terhadap dokumen legal yang selama ini menjadi hambatan administratif.

Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh peran aktif pendamping lokal, tokoh masyarakat, dan aktor-aktor kunci lainnya. Keterlibatan mereka memastikan bahwa program tidak bersifat top-down, melainkan responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik sosial budaya setempat. Selain itu, proses pendampingan yang partisipatif memperkuat kepercayaan warga terhadap program dan meningkatkan rasa memiliki terhadap perubahan yang terjadi.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, seperti koordinasi antarsektor yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya keterlibatan kelompok rentan. Hal ini menunjukkan pentingnya perbaikan dalam perencanaan terpadu, penguatan kapasitas lokal, serta penerapan prinsip inklusivitas dalam seluruh tahapan program. Tanpa langkah perbaikan tersebut, dampak pendampingan berisiko tidak merata dan kurang berkelanjutan.

Dengan melihat dinamika yang terjadi di Desa Lekor, kegiatan ini merekomendasikan agar pendekatan pendampingan lintas sektor dijadikan model dalam pengembangan kebijakan pemberdayaan desa. Model ini perlu didukung dengan regulasi yang mendorong integrasi program, pembinaan kelembagaan lokal, serta pelibatan warga secara luas. Pendekatan yang berbasis lokal, reflektif, dan adaptif akan menjadi kunci dalam membangun desa yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2022). Statistik Indonesia 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. (2020). *Prodeskel dan Pembangunan Desa*.
- Nasdian, F. T. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudaryanto, A. (2019). "Literasi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 13–25.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sutoro Eko. (2016). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: INSIST Press.
- UNDP. (2021). *Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives*.
- WHO. (2017). *Community Engagement: A Health Promotion Guide for Universal Health Coverage in the Hands of the People*. Geneva: WHO Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Sage Publications.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.)*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Bappenas. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Widianingsih, I., & Morrell, E. (2007). *Participatory Budgeting in Indonesia: A Case Study of Community Empowerment*. *Asian Social Science*, 3(9), 3–11.

- Uphoff, N. (1996). *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook with Cases*. West Hartford: Kumarian Press.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, M. (2002). *Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat: Menyemai Energi Sosial, Menuai Kemandirian*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Kabeer, N. (2001). Reflections on the Measurement of Women’s Empowerment. *Discussing Women’s Empowerment – Theory and Practice*. Sida Studies No. 3.
- Ife, J. (2013). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Zakiyah, N., & Nurhasanah, A. (2021). Integrasi Pendampingan Ekonomi dan Kesehatan dalam Program Pemberdayaan Desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 145–160.